**BAB VI**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dapat dicapai dengan efektif dan efisien dalam menjawab isu-isu strategis daerah. Penentuan strategi dan arah kebijakan dilakukan antara lain dengan melihat capaian RPJMD periode sebelumnya, potensi yang dimiliki daerah, dan dengan mengingat kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki daerah.

* 1. **Strategi**

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka Strategi yang akan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. **Misi Kesatu : Mewujudkan Peningkatan Pertanian Moderen yang Berwawasan Lingkungan;**

Strategi yang diterapkan untuk mendukung misi kesatu adalah:

1. Peningkatan Penerapan Teknologi dan inovasi Pertanian
2. Peningkatan Penyelenggaraan Penyuluhan
3. Peningkatan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan,distribusi dan konsumsi pangan
4. Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Insfrastruktur Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan
5. Peningkatan pengembangan destinasi, pemasaran dan kemitraan pariwisata
6. Peningkatan Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah
7. Peningkatan Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh
8. Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdagangan
9. Peningkatan Daya Saing Produk
10. Peningkatan Ketersediaan dan Jaminan Keamanan Produk yang Beredar (Perlindungan Konsumen)
11. Peningkatan Peran Sektor Jasa
12. Peningkatan Peran Kelembagaan Koperasi dan UMKM
13. Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Pelaku UMKM
14. Peningkatan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah
15. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Lahan
16. **Misi Kedua : Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera;**

Strategi yang diterapkan untuk mendukung misi kedua adalah:

1. Peningkatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )
2. Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
3. Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran
4. Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana
5. Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
6. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Menurunkan Tingkat Pengangguran
7. Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat
9. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Transmigrasi
10. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak
11. Peningkatan kesetaraan gender
12. Peningkatan Kualitas Kabupaten Layak Anak
13. Peningkatan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga
14. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
15. Peningkatan Prestasi Pemuda dan Atlit Olahraga
16. Peningkatan Kualitas Iman dan Taqwa
17. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Keagamaan
18. Peningkatan Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah
19. Peningkatan Promosi Seni dan Cagar Budaya
20. Peningkatan Sarana Budaya dan Kebudayaan
21. Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik dan Wawasan Kebangsaan
22. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan
23. **Misi Ketiga : Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan;**

Strategi yang diterapkan untuk mendukung misi ketiga adalah:

1. Peningkatan aksesibilitas insfrastruktur bagi pengembangan ekonomi
2. Peningkatan infrastruktur sumber daya air
3. Peningkatan rumah sehat dan layak huni
4. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang memadai
5. Peningkatan pencegahan, penanggulangan, dan penanganan bencana
6. Peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai peruntukkannya
7. Peningkatan kualitas ruang publik dan ruang terbuka hijau
8. Peningkatan pengelolaan persampahan
9. Peningkatan kelestarian lingkungan hidup
10. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan energi dan pertambangan mineral
11. Optimalisasi sumberdaya energi
12. Peningkatan transportasi masyarakat yang memadai
13. **Misi Keempat : Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal;**

Strategi yang diterapkan untuk mendukung misi kelima adalah:

1. Peningkatan aksebilitas pendidikan anak usia dini
2. Peningkatan aksebilitas pendidikan dasar
3. Peningkatan aksebilitas pendidikan menengah
4. Peningkatan aksebilitas pendidikan nonformal
5. Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini
6. Peningkatan kualitas pendidikan dasar
7. Peningkatan kualitas pendidikan menengah
8. Peningkatan kualitas pendidikan nonformal
9. Pemenuhan kebutuhan pendidik
10. Peningkatan kualifikasi akademik pendidik
11. Peningkatan budi pekerti, tata krama, dan tata nilai budaya daerah serta keteladanan
12. Peningkatan profesionalisme pendidik
13. Pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan
14. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini
15. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar
16. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah
17. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan nonformal
18. **Misi Kelima : Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat;**

Strategi yang diterapkan untuk mendukung misi kelima adalah:

1. Peningkatan Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan Yang Bermutu
2. Peningkatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3. Peningkatan Gizi Masyarakat
4. Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
5. Peningkatan Sumber Daya Kesehatan di semua Tingkatan Pelayanan Kesehatan
6. Peningkatan Lingkungan Sehat
7. Peningkatan Derajat Kesejahteraan Keluarga
8. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Atas Pelayanan Keluarga Berencana
9. **Misi Keenam : Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.**

Strategi yang diterapkan untuk mendukung misi keenam adalah:

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah
2. Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan
3. Peningkatan Kemampuan, Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Aparatur
4. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Peningkatan Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6. Peningkatan Kapasitas Kemampuan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peningkatan Tertib Administrasi Aset Pemerintah Daerah
8. Peningkatan Tertib Pengelolaan Kearsipan
9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya
10. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
11. Peningkatan Investasi
12. Peningkatan Pelayanan Perpustakaan
13. Peningkatan Kualitas Data Pembangunan dan Data Statistik Daerah
14. Peningkatan Akses atas Komunikasi dan Informasi
15. Peningkatan Pengelolaan e-Government
    1. **Arah Kebijakan**

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan pelaksanaan dari perumusan dan pelaksanaan strategi sesuai dengan periode RPJMD selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan sekaligus merupakan tema pembangunan daerah untuk setiap tahunnya.

Berdasarkan strategi diatas maka pentahapan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung selama periode 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

1. **Arah Kebijakan Tahun Pertama (2014)**

Pembangunan di tahun pertama diarahkan pada fokus pembangunan di urusan Pertanian, urusan perikanan, urusan perdagangan terutama pembangunan sarana dan prasarana perdagangan, urusan pekerjaan umum, dan urusan kesbang dan politik dalam negeri.

1. **Arah Kebijakan Tahun Kedua (2015)**

Pembangunan di tahun kedua diarahkan pada fokus pembangunan di urusan pertanian, urusan perikanan, urusan perdagangan, urusan perindustrian, urusan pariwisata, urusan kehutanan, urusan penataan ruang, dan urusan sosial.

1. **Arah Kebijakan Tahun Ketiga (2016)**

Pembangunan di tahun ketiga diarahkan pada fokus pembangunan di urusan pertanian, perikanan, lingkungan hidup, urusan pertanahan, urusan penanaman modal, urusan perhubungan, urusan pariwisata, urusan perumahan rakyat, urusan kehutanan, urusan komunikasi dan informatika, dan urusan kebudayaan.

1. **Arah Kebijakan Tahun Keempat (2017)**

Pembangunan di tahun keempat diarahkan pada fokus pembangunan di urusan lingkungan hidup, urusan pertanian, urusan pertanahan, urusan penanaman modal, urusan pariwisata, urusan perumahan rakyat, urusan komunikasi dan informatika, dan urusan kebudayaan.

1. **Arah Kebijakan Tahun Kelima (2018)**

Pembangunan di tahun kelima diarahkan pada fokus pembangunan di urusan lingkungan hidup, urusan pertanian, urusan perikanan, urusan pertanahan, urusan penanaman modal, urusan pariwisata, urusan perumahan rakyat, urusan komunikasi dan informatika, dan urusan kebudayaan.

1. **Arah Kebijakan yang dilaksanakan setiap tahun (2014-2018)**

Selain arah pembangunan pertahun diatas, terdapat pula urusan yang menjadi fokus pembangunan setiap tahunnya yaitu pembangunan di urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pemberdayaan masyarakat, urusan ketahanan pangan, urusan pekerjaan umum, urusan perencanaan, urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan persandian.

Sedangkan urusan yang lain tetap mendapatkan perhatian namun tidak difokuskan di tahun tertentu, antara lain urusan energi dan ESDM, urusan transmigrasi, urusan perpustakaan, urusan kearsipan, urusan statistik, dan urusan-urusan yang lainnya.

* 1. **Keterkaitan Misi, Strategi, dan Arah Kebijakan.**

Keterkaitan antara Misi, Strategi, dan Arah Kebijakan adalah sebagaiman disampaikan pada tabel 6.1.

Tabel 6.1.

Keterkaitan Misi, Strategi, dan Arah Kebijakan

Pembangunan Daerah Tahun 2013-2018

| **MISI** | | **STRATEGI** | | **ARAH KEBIJAKAN** | | **PROGRAM PRIORITAS** | **PRIORITAS PROGRAM** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| ***1*** | | ***2*** | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** | | | | |
| 1 | Mewujudkan Peningkatan Pertanian Moderen yang Berwawasan Lingkungan | 1 | Peningkatan Penerapan Teknologi dan inovasi Pertanian | 1 | Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi di Pertanian dalam menunjang upaya peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor pertanian/perkebunan | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Peternakan / Perkebunan |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Peningkatan Penerapan Teknologi, inovasi Peternakan | 2 | Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi di Pertanian dalam menunjang upaya peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan | Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Peningkatan Nilai Tambah hasil produksi Pertanian | 3 | Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi dalam pemasaran produk Pertanian dan memperbesar akses pemasaran | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Peningkatan Kualitas hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan | 4 | Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi Pertanian dalam rangka meningkatkan kualitas produk pertanian dan pencegahan hama dan penyakit | Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Peningkatan Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Diversifikasi Produk Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan | 5 | Meningkatkan upaya intensifikasi dan diversifikasi budidaya tanaman pertanian dan perkebunan | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan/peternakan |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Peningkatan produktivitas ternak | 6 | Meningkatkan upaya intensifikasi dan diversifikasi produksi hasil peternakan | Program Peningkatan Produksi Hasil peternakan |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Peningkatan Kualitas kelembagaan petani dan SDM Penyuluhan | 7 | Meningkatkan Kualitas kelembagaan petani dan SDM penyuluhan | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Pemberdayaan Petani |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Insfrastruktur Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan | 8 | Meningkatkan Penyediaan Sarana Prasarana dan Insfrastruktur pendukung pertanian (jalan usaha tani dan pengelolaan embung) | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan/peternakan |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Peningkatan Pengembangan Kawasan Agropolitan | 9 | Meningkatkan Pengembangan Kawasan Agropolitan dan pengelolaan kawasan agropolitas yang sudah terbentuk | Program Pengembangan Agribisnis |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan | 10 | Meningkatkan Penerapan Teknologi dan inovasi Perikanan khususnya penggunaan benih unggul ikan | Program Pengembangan Budidaya Perikanan |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Peningkatan Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Diversifikasi Produk Perikanan | 11 | Meningkatkan Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Diversifikasi Produk olahan Perikanan yang didukung dengan pengembangan akses pemasaran produk perikanan | Program Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Pengembangan Kawasan budidaya air tawar |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Pengembangan Perikanan Tangkap |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Peningkatan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan,distribusi dan konsumsi pangan | 12 | Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan | Program peningkatan ketahanan pangan |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Peningkatan pengembangan destinasi, pemasaran dan kemitraan pariwisata | 13 | Mengembangkan Kawasan Agrowisata | Program Pengembangan Destinasi Wisata |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana serta event pariwisata dengan pengembangan destinasi pariwisata dan kemitraan pariwisata |
|  |  | 14 | Peningkatan Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah | 15 | Meningkatkan pengembangan Industri kecil dan UMKM yang berbasis pertanian dan komoditas unggulan daerah lainnya | Program Industri Kecil dan Menengah |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Peningkatan Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh | 16 | Meningkatkan Struktur Industri yang menggunakan bahan Baku Lokal |
|  |  | 16 | Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdagangan | 17 | Meningkatkan Pengelolaan dan pengembangan pasar daerah sebagai salah satu Sarana dan Prasarana Perdagangan | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lainnya |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Pengelolaan Pasar Daerah |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | Peningkatan Daya Saing Produk | 18 | Meningkatkan nilai ekspor produk daerah dan promosi produk unggulan daerah serta pembinaan usaha informal | Program Peningkatan dan pengembangan ekspor |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pembinaan pedagang Kaki lima dan Asongan |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | Peningkatan Ketersediaan dan Jaminan Keamanan Produk yang Beredar (Perlindungan Konsumen) | 19 | Meningkatkan perlindungan atas konsumen dan sengketa konsumen terhadap produk yang beredar | Perlindungan Konsumen |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | Peningkatan Peran Sektor Jasa, Kelembagaan Koperasi dan UMKM | 20 | Meningkatkan Kualitas kelembagaan koperasi | Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Pelaku UMKM | 21 | Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Pelaku UMKM melalui pengembangan kewirausahaan dan pengembangan keunggulan kompetitif yang dimiliki UMKM/UKM | Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | Peningkatan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah | 22 | Meningkatkan Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Tanah | Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Lahan | 23 | Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Sumber Daya Hutan | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan |  |  |  |  |  |
| 2 | Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera | 1 | Peningkatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) | 1 | Meningkatkan penanganan pada PMKS dan peningkatan penanganan RTLH | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program pembinaan anak terlantar |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial | 2 | Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berupa peningkatan lembaga sosial, CSR Sosial, dan organisasi sosial lainnya dalam menangani PMKS | Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran | 3 | Meningkatkan perlindungan sosial terhadap Rumah Tangga Sasaran | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Pemberdayaan Fakir Miskin |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana | 4 | Meningkatkan upaya penanganan terhadap bencana alam | program pencegahan dan kesiapsiagaan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | program tanggap darurat dan logistik |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja | 5 | Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja melalui pelatihan yang berbasis kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat, dan berbasis kewirausahaan | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Peningkatan Kesempatan Kerja dan Menurunkan Tingkat Pengangguran | 6 | Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Menurunkan Tingkat Pengangguran melalui upaya peningkatan penempatan pencari kerja | Program Peningkatan Kesempatan Kerja |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Peningkatan Kesempatan Kerja |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga | 7 | Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Peningkatan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat | 8 | Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan angka kemiskinan, serta peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat | Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Transmigrasi | 9 | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Transmigrasi dan peningkatan kualitas transmigran | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 10 | Meningkatkan upaya penanganan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Peningkatan kesetaraan gender | 11 | Meningkatkan kelembagaan pengarusutamaan gender melalui implementasi anggaran yang responsisf gender | Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Peningkatan Kualitas Kabupaten Layak Anak | 12 | Meningkatkan perlindungan anak dan pengembangan pemenuhan hak-hak anak |
|  |  | 13 | Peningkatan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga | 13 | Meningkatkan Pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga | 14 | Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Peningkatan Prestasi Pemuda dan Atlit Olahraga | 15 | Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan olahraga dan pembinaan olahraga Prestasi dan Atlit Olahraga | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Keagamaan | 16 | Meningkatkan pemberian bantuan sarana dan prasarana pendukung kegiatan keagamaan | Program Pengembangan Nilai Keagamaan |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | Peningkatan Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah | 17 | Meningkatan Pengembangan, Pelestarian dan pemeliharaan nilai tradisi budaya dan benda bersejarah serta benda arkeologi | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | Peningkatan Promosi Seni dan Cagar Budaya | 18 | Meningkatkan Promosi Seni dan Cagar Budaya melalui penyelenggaraan gelar seni, kajian seni, promosi seni, organisasi seni, dan tempat-tempat kesenian | Program Pengelolaan Keragaman Budaya |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | Peningkatan Sarana Budaya dan Kebudayaan | 19 | Meningkatkan Sarana dan prasarana dalam rangka pengelolaan kekayaan Budaya dan Kebudayaan | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik dan Wawasan Kebangsaan | 20 | Meningkatkan Kualitas Kehidupan Politik dan Wawasan Kebangsaan masyarakat melalui pendidikan politik masyarakat dan penanganan penyakit masyarakat | Program pendidikan politik masyarakat |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program pengembangan wawasan kebangsaan |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | Peningkatan Ketertiban dan Keamanan | 21 | Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan melalui penegakan peraturan daerah, penurunan angka kriminalitas, penanganan demonstrasi, dan patroli siaga serta ketersediaan tenaga linmas di masyarakat | Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan |  |  |  |  |  |
| 3 | Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan | 1 | Peningkatan aksesibilitas Insfrastruktur bagi pengembangan ekonomi | 1 | Meningkatkan dan mengembangkan Infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai melalui pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Meningkatkan ketersediaan ruas jalan baru sebagai alternatif pemecahan masalah dalam mengurai kemacetan | Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | peningkatan Infrastruktur Sumber Daya Air | 3 | Meningkatan ketersediaan Infrastruktur Sumber Daya Air melalui pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan drainase | Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Peningkatan kualitas bangunan instansi pemerintah | 4 | Meningkatkan kelayakan bangunan-bangunan pemerintahan berupa pelaksanaan pemugaran bangunan instansi pemerintah | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Peningkatan Rumah Sehat dan Layak Huni | 5 | Meningkatkan Rumah yang sehat dan Layak Huni melalui penyediaan rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh, penyediaan layanan air minum, sanitasi pemukiman yang layak dan penyediaan sarana dan prasarana umum pemukiman | Program Lingkungan Sehat Perumahan |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana | 6 | Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana kebakaran melalui upaya meningkatkan luasan pelayanan, waktu tanggap kebakaran dan penyediaan sarana prasarana pemadam kebakaran | Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Peningkatan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukkannya | 7 | Meningkatkan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukkannya melalui penyusunan dokumen tata ruang, pengendalian perizinan, penyediaan ruang khusus (RTH dan Pedestrian) | Program Perencanaan Tata Ruang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan trotoar |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | peningkatan Pengelolaan Persampahan | 8 | Meningkatkan Pengelolaan Persampahan yang didukung oleh meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup | 9 | Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup khususnya penanganan dan pencegahan pencemaran air, udara, dan tanah | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Pertambangan Mineral | 10 | Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Pertambangan Mineral terutama pemanfaatan sumber energi alternatif terbarukan | Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Peningkatan Transportasi Masyarakat yang Memadai | 11 | Meningkatkan Transportasi Masyarakat yang Memadai melalui uji kendaraan, meningkatnya keselamatan angkutan, meningkatnya tipe terminal, dan pengembangan rute baru angkutan umum | Program peningkatan pelayanan angkutan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan |  |  |  |  |  |
| 4 | Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal | 1 | Peningkatan budi pekerti, tata krama, dan tata nilai budaya daerah serta keteladanan | 1 | Meningkatkan budi pekerti, tata krama, dan tata nilai budaya daerah serta keteladanan melalui penyusunan kurikulum muatan lokal budi pekerti, penyediaan buku muatan lokal budi pekerti, keteladanan guru, dan penenganan kenakalan siswa didik | Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah , dan Pendidikan nonformal |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program manajemen pelayanan pendidikan |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Peningkatan aksebilitas pendidikan anak usia dini | 2 | Meningkatkan aksebilitas pendidikan anak usia dini melalui pengembangan pelayanan pendidikan terhadap anak usia 0-6 tahun (anak usia dini) | Program pendidikan anak usia dini |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Peningkatan aksebilitas pendidikan dasar | 3 | Meningkatkan aksebilitas pendidikan dasar melalui pengembangan pelayanan pendidikan dasar dan pemberian beasiswa | Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Peningkatan aksebilitas pendidikan menengah | 4 | Meningkatkan aksebilitas pendidikan menengah melalui pengembangan pelayanan pendidikan menengah dan pemberian beasiswa serta penyediaan unit sekolah menengah | Program pendidikan menengah |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Peningkatan aksebilitas pendidikan nonformal | 5 | Meningkatkan aksebilitas pendidikan nonformal melalui pengembangan pelayanan pendidikan kesetaraan di masyarakat | Program Pendidikan Non Formal |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini | 6 | Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini melalui pelaksanaan akreditasi sekolah TK/RA | Program manajemen pelayanan pendidikan |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Peningkatan kualitas pendidikan dasar | 7 | Meningkatkan kualitas pendidikan dasar melalui pelaksanaan akreditasi sekolah SD/MI dan SMP/MTs, dan peningkatan kelulusan dengan rerata hasil ujian nasional minimal 7 untuk SD/MI dan SMP/MtS | Program manajemen pelayanan pendidikan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Manajemen Pelayanan Pendidikan |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Peningkatan kualitas pendidikan menengah | 8 | Meningkatkan kualitas pendidikan dasar melalui pelaksanaan akreditasi sekolah SMA/MA dan akreditasi program keahlian SMK , dan peningkatan kelulusan dengan rerata hasil ujian nasional minimal 7 untuk SMA/MA | Program manajemen pelayanan pendidikan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program pendidikan menengah |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Peningkatan kualitas pendidikan nonformal | 9 | Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal melalui peningkatan angka kelulusan pendidikan kesetaraan | Program pendidikan nonformal |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Pemenuhan kebutuhan pendidik | 10 | Meningkatkan pemenuhan kekurangan tenaga pendidik mulai dari tingkat TK/RA, SD/MI, SMP,MTs, dan SMA/MA/SMK | Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Peningkatan kualifikasi akademik pendidik | 11 | Meningkatkan kualifikasi akademik pendidik minimal S-1 khususnya di tingkat TK/RA dan SMP/MTs, serta pemenuhan kualifikasi bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah | Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Peningkatan profesionalisme pendidik | 12 | Meningkatkan profesionalisme pendidik yang ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat pendidik bagi guru di tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK | Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan | 13 | Meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap Jumlah Tenaga Kependidikan yang meliputi tenaga administrasi, penilik sekolah, pengawas sekolah, dan pamong belajar | Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini | 14 | Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (TK/RA) sesuai dengan kebutuhan | Program Pendidikan anak usia dini |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar | 15 | Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) sesuai dengan kebutuhan | Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah | 16 | Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) sesuai dengan kebutuhan | Program pendidikan menengah |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan nonformal | 17 | Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan nonformal (penyelenggara pendidikan kesetaraan) sesuai dengan kebutuhan | Program pendidikan nonformal |  |  |  |  |  |
| 5 | Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat | 1 | Peningkatan Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan Yang Bermutu | 1 | Meningkatkan Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan Yang Bermutu mulai tingkat Desa/Kleurahan, Kecamatan, sampai dengan Kabupaten | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Peningkatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | 2 | Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penanganan dan Pengendalian Penyakit, serta kewaspadaan adanya potensi KLB | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Peningkatan Gizi Masyarakat | 3 | Meningkatkan Gizi Masyarakat melalui perbaikan gizi masyarakat terutama usia balita dan penduduk miskin | Perbaikan Gizi Masyarakat |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | 4 | Meningkatkan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dasar termasuk dengan pengawasan obat dan makanan | Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Program Obat dan Perbekalan Kesehatan) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Pengawasan Obat dan Makanan |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Peningkatan Sumber Daya Kesehatan di semua Tingkatan Pelayanan Kesehatan | 5 | Meningkatkan Sumber Daya Kesehatan di semua Tingkatan Pelayanan Kesehatan yang diikuti dengan meningkatnya pengelolaan dan manajemen kesehatan di semua tingkatan | Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Peningkatan Lingkungan Sehat | 6 | Meningkatkan Lingkungan Sehat melalui pengembangan akses yang berkelanjutan terhadap sanitasi dasar di perkotaan dan perdesaan, akses terhadap air bersih, dan penggunaan jamban keluarga | Pengembangan Lingkungan Sehat |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Upaya Kesehatan Masyarakat |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Peningkatan Derajat Kesejahteraan Keluarga | 7 | Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Keluarga melalui pembinaan kesejahteraan keluarga | Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Atas Pelayanan Keluarga Berencana | 8 | Meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Atas Pelayanan Keluarga Berencana | Program Keluarga Berencana |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/IADS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Pelayanan Kontrasepsi |  |  |  |  |  |
| 6 | Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik | 1 | Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah | 1 | Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah yang Terpadu dan Partisipatif | Program Perencanaan Pembangunan Daerah |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan | 2 | Meningkatkan Tertib Administrasi Pertanahan dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan | Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Peningkatan Kemampuan, Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Aparatur | 3 | Meningkatkan Kemampuan, Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Aparatur melalui diklat pegawai, meningkatnya pendidikan formal pegawai, pemenuhan hak dan penghargaan pegawai, dan pengisian jabatan struktural yang kosong | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Pendidikan Kedinasan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Administrasi Kepegawaian |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 4 | Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terutama pada sisi pemenuhan ketersediaan peraturan perundang-undangan, penanganan temuan pemeriksaan, ketepatan pelaksanaan pembangunan, dan pelaporan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Penataan Daerah Otonomi Baru |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Penataan Daerah Otonomi Baru |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Kerjasama Daerah |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Peningkatan Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 5 | Meningkatkan Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Desa | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Peningkatan Kapasitas Kemampuan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah | 6 | Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pada aspek Pendapatan Asli Daerah | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Peningkatan Tertib Administrasi Aset Pemerintah Daerah | 7 | Meningkatkan Tertib Administrasi Aset Pemerintah Daerah dan pengembangan pengelolaan asset yang dimiliki daerah | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Peningkatan Tertib Pengelolaan Kearsipan | 8 | Meningkatkan Tertib Pengelolaan Kearsipan secara baku | Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Daerah |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya | 9 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya | Program Penataan Administrasi Kependudukan |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | 10 | Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui ketersediaan SOP, ketepatan waktu, dan penanganan pengaduan masyarakat | Program Peningkatan Pelayanan Perizinan |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Peningkatan Investasi | 11 | Meningkatkan Investasi melalui pelaksanaan promosi investasi dan dukungan iklim investasi yang memadai | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Peningkatan Pelayanan Perpustakaan | 12 | Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan kepada masyarakat yang disertai peningkatan kunjungan perpustakaandan peminjaman buku koleksi perpustakaan | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Peningkatan Kualitas Data Pembangunan dan Data Statistik Daerah | 13 | Meningkatkan Kualitas Data Pembangunan dan Data Statistik Daerah yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan setiap tahunnya | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Peningkatan Akses atas Komunikasi dan Informasi | 14 | Meningkatkan Akses atas Komunikasi dan Informasi kepada masyarakat, khususnya di ruang publik melalui berbagai media yang ada | program pengembangan informasi dan komunikasi |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Peningkatan Pengelolaan e-Government | 15 | Meningkatkan Pengelolaan e-Government pada pemerintah daerah dan pemerintah desa | program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa |  |  |  |  |  |

Keterangan : tahun yang tidak diarsir merupakan tahun dimana arah kebijakan pembangunan berlaku disetiap tahun tersebut.